

**ANALISIS TINGKAT EFISIEN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Oleh
NURUL FITRIANA
NIM 105730530415



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2019

PERSEMBAHAN

“Dengan Kerendahan Hati dan Penuh Rasa Syukur Skripsi ini Peneliti Persembahkan Untuk” Kedua Orang Tua Saya Dan untuk keluarga serta sahabat dan orang-orang yang Menyayangiku yang tak bisa penulis cantumkan satu persatu.



**“ Kesuksesan Hanya Dapat Diraih Dengan Segala Upaya Dan Usaha Yang disertai Dengan Doa, Karna Sesungguhnya Nasib Seseorang Manusia Tidak Akan Berubah Dengan Sendirinya Tanpa Berusaha....”
Siapa Bersungguh-sungguh pasti berhasil Siapa yang bersabar pasti beruntung Siapa Menapaki Jalan-Nya akan Sampai Tujuan**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Analisis Tingkat Efisien dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar"

Nama : Nurul Fitriana
NIM : 105730530415
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ. 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Agus Salim HR, SE., MM
NIDN: 0911115703

Pembimbing II

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NIDN: 0915058801

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NBM. 107 5428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

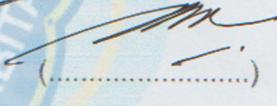
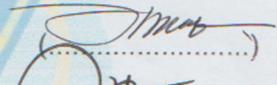
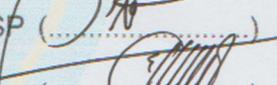
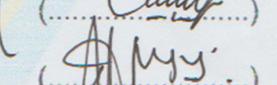
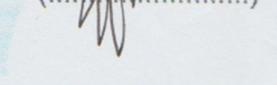
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama NURUL FITRIANA, NIM 105730530415, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 145 / Tahun 1441 H/2019, Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Dzulhijja 1441 H
Makassar, _____
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Asriati, SE., M.Si 
2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP 
3. Saida Said, SE., M.Ak. Ak 
4. Waode Rayyani, SE., M.Si.Ak.CA 



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL FITRIANA
 Stambuk : 105730530415
 Program studi : Akuntansi
 Dengan Judul : Analisis Tingkat Efisien dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Nurul Fitriana

Diketahui oleh:



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903078

Ketua Program Studi,

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NBM. 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Efisien Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Rajuli dan ibu Rosdiana yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof .Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agussalim HR., S.E.,M.M , selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi., SE., M.Si. Ak. CA. CSP, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 2019

Nurul Fitriana



ABSTRAK

Nurul Fitriana, 2019 “Analisis Tingkat Efisien dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar”. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Agus Salim dan Pembimbing II Bapak Ismail Badollahi.

Penelitian ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana tingkat efisien dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada kantor bupati takalar

Judul skripsi ini telah disetujui untuk dilakukan penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah 1 (satu) bulan terhitung dari Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 15 Juni 2019. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Analisis Deskriptif dengan menggunakan metode Kualitatif jenis data yaitu dari data primer dan data sekunder. Sementara untuk pengumpulan data yang digunakan ada 4 macam teknik yaitu observasi, interview dan dokumentasi . Dalam penelitian ini pimpinan instansi yang dianggap dapat memberikan informasi atau masukan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Tingkat Efisien dan Efektivitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar cukup Efektif dan belum Efisien karena memiliki beberapa kekurangan serta belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kata kunci : efisiensi, efektivitas, pengelolaan keuangan daerah.

ABSTRACT

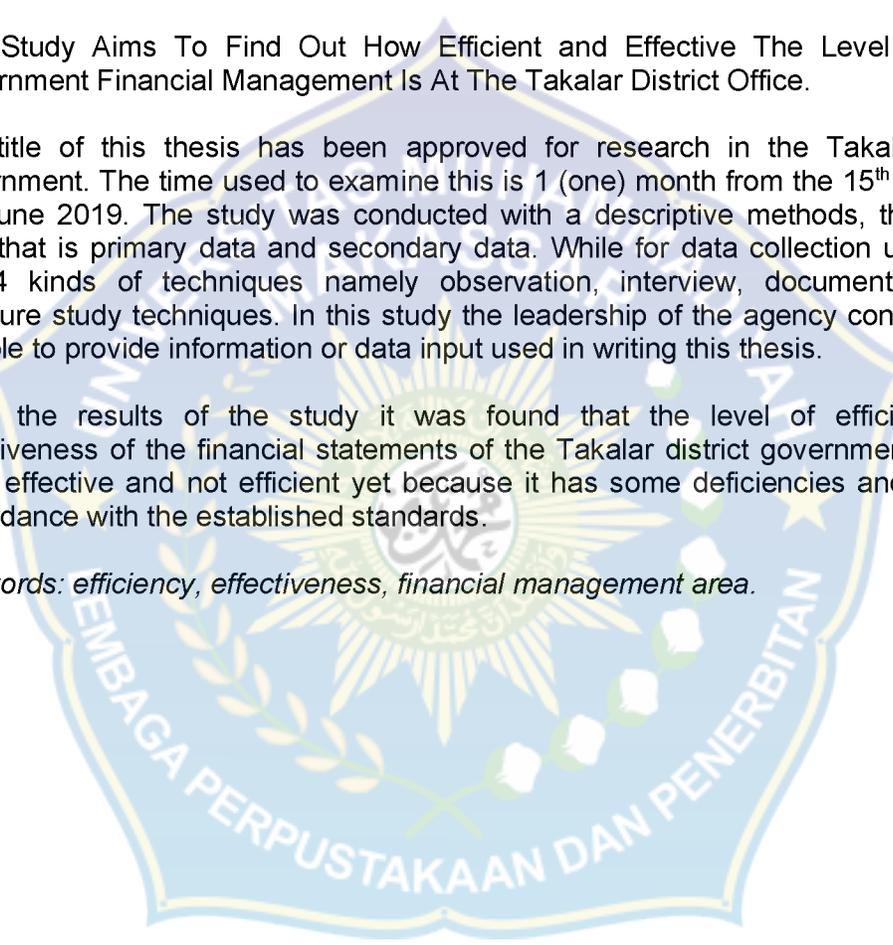
Nurul Fitriana, 2019 "Analysis of The Level Of Efficiency and Effectiveness Of The Financial Management Of Takalar District Government ". Supervisor Board: Agus salim and Ismail badollahi.

This Study Aims To Find Out How Efficient and Effective The Level Of Local Government Financial Management Is At The Takalar District Office.

The title of this thesis has been approved for research in the Takalar district government. The time used to examine this is 1 (one) month from the 15th July to the 15th June 2019. The study was conducted with a descriptive methods, the type of data that is primary data and secondary data. While for data collection used there are 4 kinds of techniques namely observation, interview, documentation and literature study techniques. In this study the leadership of the agency considered to be able to provide information or data input used in writing this thesis.

From the results of the study it was found that the level of efficiency and effectiveness of the financial statements of the Takalar district government has not been effective and not efficient yet because it has some deficiencies and is not in accordance with the established standards.

Keywords: efficiency, effectiveness, financial management area.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR/BAGIAN | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah..... | 6 |
| B. Pengelolaan Keuangan Pemerintah..... | 8 |
| C. Efisien Dan Efektivitas | 10 |

| | |
|---|-----------|
| D. Defenisi Keuangan Sektor Publik..... | 13 |
| E. Pengukuran Kinerja Sektor Publik..... | 18 |
| F. Defenisi Analisis Laporan Keuangan..... | 20 |
| G. Prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintahan..... | 25 |
| H. Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| I. Kerangka Konsep..... | 28 |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 30 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 30 |
| B. Jenis Penelitian..... | 30 |
| C. Fokus Penelitian..... | 30 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 31 |
| E. Instrument Peneltian..... | 31 |
| F. Jenis dan Sumber Data..... | 32 |
| G. Metode Analisis Data..... | 33 |
| H. Skala Pengukuran Efektivitas dan Efisien..... | 33 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian..... | 34 |
| B. Hasil Penelitian..... | 49 |
| C. Pembahasan..... | 58 |
| BAB V. PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|-----------|--|---------|
| Tabel 3.1 | Skala Pengukuran Efektivitas dan Efisien | 33 |
| Tabel 4.1 | Anggaran dan Realisasi pendapatan daerah | 54 |
| Tabel 4.2 | Anggaran dan Realisasi Belanja daerah | 56 |



DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul | Halaman |
|------------|---|---------|
| Gambar 2.1 | Kerangka Konsep | 28 |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Kantor Bupati Takalar | 48 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi mempunyai tujuan baik tujuan umum maupun khusus, dengan menggunakan berbagai sumberdaya dan faktor produksi yang ada. Pengelola tidak akan mencapai tujuan secara optimal jika penggunaan sumberdaya atau faktor produksi dilakukan tidak dengan proses yang benar. Manajemen berperan penting karena manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan atau pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya tercapai dengan tepat.

Menurut Salamadian (2018:4), ada dua konsep utama untuk menilai manajer dan organisasi yaitu efisiensi dan keefektifan. Efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan keefektifan ialah keadaan dimana seseorang berpengaruh atau terkesan untuk mencapai tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif dengan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Keefektifan dapat dikatakan efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal.

Menjalankan proses manajerial terutama keefektifan pengambilan keputusan secara baik diperlukan informasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Informasi akuntansi ini mendeskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keefektifan keuangan dan disertai satuan moneter. Pada umumnya manajemen mengembangkan sistem informasi untuk

menyediakan informasi yang relevan dan berguna. Manajemen membuat laporan yang memuat informasi akuntansi dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya organisasi.

Beberapa penelitian terdahulu terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan terhadap motivasi, kepuasan dan kualitas kerja karyawan perusahaan. Sehingga pada perusahaan tersebut dikatakan efisien dan keefektifan keberhasilan suatu perusahaan terhadap karyawan tersebut. Pada penelitian ini berfokus pada peningkatan efisien dan keefektifan kinerja pegawai pada bagian pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Motivasi penelitian dalam memilih judul ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, peneliti juga tertarik tentang bagaimana kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga–lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan tersebut.

Diberlakukannya Otonomi Daerah mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 17 Tahun 2003 dalam Priyama dkk (2014). Tentang keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan. Informasi yang bermanfaat bagi pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai, informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh BPK.

Suatu daerah atau wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara alamiah tanpa harus ada yang terencana atau dengan adanya struktur-struktur tertentu yang harus diikuti dalam perkembangan suatu wilayah atau daerah. Namun dalam suatu wilayah sangat penting dan terstrategisnya aspek keuangan dalam proses perkembangan suatu wilayah. Begitu pula dalam struktur organisasi pemerintahan dibentuk suatu organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Bupati Takalar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efisien dan keefektifan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada dinas pengelolaan keuangan kabupaten takalar. Dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada pada sistem yang sedang berjalan saat ini.

D. Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara teoritis, maupun praktis diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkait dengan efisien dan keefektifan terhadap kinerja auditor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, bahan pertimbangan dan bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses audit dan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja auditor serta usaha-usaha yang dilakukan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dari sebagai wacana keilmuan bagi yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah

Pada dasarnya kata sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain. Menurut Agus Mulyanto (2009:1) sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem.

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, social, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang atau berlaku pada suatu Negara Republik Indonesia.

akuntansi pemerintahan harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel. Lebih lanjut, sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana atau program dan atau evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. (Risman,2015)

Keunikan di Indonesia adalah sistem akuntansi pemerintah Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu: sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan atau pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas pemerintah pusat. Sedangkan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Selain UU 1945 dan perubahannya, maka dasar hukum yang menjadi acuan utama dan bersifat lebih teknis terkait sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah UU yang mengatur keuangan Negara. Pasal 32 (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang di dalamnya mengamanatkan bahwa laporan Selain itu adalah UU tentang pemerintah daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah yaitu pasal 184 ayat 1 UU No. 32 TAHUN 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan dengan peraturan pemerintah.

Lalu bagaimana sistem akuntansi pemerintah di mata profesi akuntansi?. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang simentris dengan diberlakukannya standar akuntansi di sektor komersial. Dalam hal ini pemerintah merupakan subjek penyusun dan sekaligus pemakai yang berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintah yang handal. Usaha untuk menciptakan sistem akuntansi pemerintah terlihat dari diundangkannya tiga paket keuangan Negara.

Selain adanya sistem akuntansi pemerintah pusat, maka terdapat pula sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). SAKD disusun dengan tujuan menyediakan pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan bagi transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, dan menyediakan pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klarifikasi rekeningdan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan dan pelaporan Keuangan Pemerintah daerah

B. Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Menurut Eko santoso (2011:9), Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan contoh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses

pengelolaan keuangan pemerintah Daerah pada khususnya. Sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa batasan tentang Keuangan Daerah pada dasarnya menetapkan bahwa keuangan daerah tidak lain adalah segala hak atau kewajiban daerah yang dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya aset berupa barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah, maka ruang lingkup keuangan daerah akan dihadapkan kepada persoalan jenis-jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat dikelola langsung, berupa uang maupun berupa barang milik daerah terutama digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan yang bersangkutan. Hasdiana (2015:259)

Laporan keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan, lembaga/kepala SKPD serta kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian Negara/lembaga/SKPD/pemerintah. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian pengelolaan keuangan Negara dalam arti sempit adalah kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan Negara. Tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan membentuk menaikkan daya tahan dalam kegiatan ekonomi yang bersifat global (Adrian Sutedi, 2012:120). Sedangkan menurut (Halim,2007:330) pengelolaan

keuangan daerah adalah suatu kegiatan yang disusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan. Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan.

Menurut (PP RI No. 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah) adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu/berfokus pada kepentingan publik. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien.

C. Efisien dan Efektivitas

1. Pengertian Efisien

Menurut Nordiawan dan Ayuningtyas, (2010:125). mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar rasio maka semakin tinggi tingkat efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan dana yang serendah-rendahnya.

Menurut Mahmudi, (2011:92) efisien adalah perbandingan antara output dan input. Output merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan daerah, dan input adalah realisasi dari penerimaan daerah dalam hal pendapatan. Efisien

adalah kemampuan perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya untuk memperoleh output semaksimal mungkin.

Efisiensi akan terjadi apabila dengan jumlah sumberdaya yang sama dapat dihasilkan lebih banyak produksi dari pada sebelumnya, atau jumlah produksi yang sama dapat dihasilkan dari pemakaian sumber daya yang lebih sedikit dari pada sebelumnya. Adapun faktor penentuan efisiensi adalah:

1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dan jabatan-jabatan baik ini structural maupun fungsional
3. Faktor sumberdaya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumberdaya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan
4. Faktor dukungan aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

2. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan dahulu. Secara singkat efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan. Berikut definisi dari efektivitas menurut para ahli :

Menurut Prasetyo budi sarkono adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Hidayat efektivitas adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas, dan waktu telah dicapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektifitasnya. Dan menurut Siagaan efektivitas merupakan suatu yang menekankan pada hasil yang akan dicapai oleh suatu perusahaan atau seseorang.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Adapun untuk mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang yang tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan atau tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka itu dapat dikatakan tidak efektif.

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian efektivitas sebagai berikut :

1. Aspek Peraturan/ ketentuan, peraturan yang dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.
2. Aspek fungsi/tugas, individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.
3. Aspek rencana/program. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan mungkin dapat tercapai.
4. Aspek tujuan/ kondisi ideal/ yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.

D. Defenisi Keuangan Sektor Publik

Menurut Mahsun (2016:5) Sektor publik seringkali dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sector publik. Oleh karena itu area sketor publik sangat luas, maka

dalam penyelenggaraannya sering diserahkan kepada pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi.

Keuangan sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah, guna untuk pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Definisi lain yang disampaikan Jones dan Pendlebury, 2010, mengatakan sektor publik sebagai “pemerintah yang menyediakan langkah-langkah untuk utang sektor publik. Akumulasi dan persyaratan pinjaman publik untuk tahun yang berjalan.

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Kewajiban pihak pemegang memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan aktivitas dan kegiatan bertanggungjawab kepada pihak yang memberikan amanah disebut Akuntabilitas Publik.

1. Karakteristik Keuangan Sektor Publik

Organisasi sektor publik dapat dipahami sebagai alat dan wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi memerlukan manajemen yang baik agar bisa mencapai tujuan. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Karakteristik keuangan sektor publik kualitatif (azhari,2016) adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Adapun karakteristik prasyarat normative yang diperlukan dalam laporan keuangan sektor publik untuk memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

- a. Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.
- b. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2. Standar Akuntansi Sektor Publik

Menurut PSAK, Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintahan Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar

akuntansi sektor publik yang memuat rumusan secara terperinci oleh elemen-elemen standar akuntansi.

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap standar akuntansi, maka perlu diterbitkan interpretasi standar akuntansi dan dibuletin teknis. Bulletin teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh komite yang memberikan arahan atau petunjuk secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.

SAP yang dirumuskan oleh komite standar akuntansi pemerintahan juga menerbitkan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah (IPSAP) dan bulletin teknis. Selanjutnya organisasi sektor publik jika akan membuat sistem akuntansi harus mengacu pada standar akuntansi yang telah dirumuskan tersebut.

3. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan dana dan keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan.

Tujuan pembuatan laporan keuangan sektor publik, Mahsun (2016:115) yaitu:

1. Kepatuhan dan pengelolaan, laporan keuangan dibuat untuk memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dan penguasa

pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan memungkinkan pihak untuk menilai efisiensi dan keefektifan penggunaan sumberdaya organisasi.
3. Kelangsungan organisasi, laporan keuangan berfungsi untuk membantu para pembaca menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja tersebut dapat melangsungkan usahanya untuk menyediakan barang dan jasa dimasa yang akan datang.
4. Hubungan masyarakat, laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut *public sector committee – IFAC*, tujuan laporan keuangan sektor publik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1. Tujuan secara umum meliputi, memberikan informasi yang bermanfaat, dan memaknai kebutuhan pemakai.
2. Tujuan secara khusus, yaitu mengidentifikasi sumberdaya yang dapat digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum dan menyediakan informasi tentang sumberdaya alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan, dan menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan organisasi sektor publik.

E. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

1. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*), Mahsun(2016:141) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang dan organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisien penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh kepuasan pelanggan, dan keefektifan dalam tindakan mencapai tujuan. (Rebertson,2002).

Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker (dalam BPKP,2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simons (dalam BPKP,2000) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan membandingkan antara hasil aktual.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

2. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan, sasaran, dan strategis organisasi
2. Merumuskan indicator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja, penilaian kemajuan organisasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

3. Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja

Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kerja. Hasil dari pengukuran kinerja ini memberitahukan hal apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi dan apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasi strategi dalam perubahan operasional apa yang dibutuhkan agar keefektifan pengukuran kinerja menyediakan dasar organisasi untuk menilai.

4. Sistem Pengukuran Kinerja

System pengukuran kinerja merupakan suatu sitem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu startegi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sebelum proses pengukuran dilakukan, berbagai aktivitas manajemen strategi harus sudah didesain dan dilaksanakan, yaitu perencanaan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, dan implementasi. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan sehingga tercapai sistem pengukuran yang mampu memperaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan.

F. Definisi Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang didapatkan benar-benar tepat pula, kesalahan dalam pengimputan angka dapat berakibat fatalbagi perusahaan dan hasil yang muncul tidak akurat. Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaan atau mempelajari dari hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan. (Septiana,2014)

Menurut Harahap (2015:190) Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan lain baik antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Menurut Prastowo (2015:50). Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Menurut Herry (2015:132). Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut guna memperoleh pengertian pada masa mendatang.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses untuk mempelajari ataupun menggunakan pos-pos laporan keuangan untuk melihat informasi keuangan yang bersifat signifikan untuk menentukan posisi keuangan dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Dari definis diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan. Atau analisis laporan keuangan ialah menggali informasi lebih banyak yang dikandung suatu laporan keuangan.

1. Tujuan Laporan Keuangan

Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah disusun. Tujuan laporan keuangan menurut (Bernstein,1983) adalah:

1. *Screening*, analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.
2. *Understanding*, memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya.
3. *Forecasting*, analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang
4. *Diagnosis*, analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan atau masalah lain dalam perusahaan
5. *Evaluation*, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

Disamping tujuan tersebut, analisis laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam.

2. Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Menurut Sofjen (2013:195), manfaat analisis laporan keuangan adalah:

- a. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari pada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
- b. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan.
- c. Dapat mengetahui kesalaham yang terkandung dalam laporan keuangan.
- d. Dapat membokar hal-hal yang tidak konsisten dala, hubungannya dengan sesuatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen internal maupun informasi diperoleh dari luar perusahaan.
- e. Dapat memberikan informasi yang diingikan oleh para pengambil keputusan.

3. Kelemahan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2009:203). Kelemahan analisis laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh karna itu kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis itu tidak salah.
2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan untuk menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, dan budaya perusahaan.
3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan.

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu dilihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka.
5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena masalah kurs konveksi atau metode konsolidasi.

4. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan keuangan ialah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan pokok oleh Badan Pemeriksa Keuangan berbasis akrual terdiri atas berikut ini:

1. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah periode tertentu.
4. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam pelaporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

G. Prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintahan

Prinsip akuntansi pemerintahan merupakan “ketentuan” yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan mengungkapkan tujuan prinsip dasar sebagai berikut:

a. Prinsip nilai historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi.

b. Prinsip realisasi, Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan dalam akuntansi pemerintah tidak dapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

c. Prinsip substansi mengungguli bentuk

Informasi untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharus disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak

konsisten dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama dan semesteram juga dianjurkan.

e. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

| No | peneliti | Judul | Metode analisis data | Hasil |
|----|-----------------|---|------------------------|---|
| 1 | Erwin saraswati | Efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan daerah | Kuantitatif deskriptif | kualitas belanja daerah umumnya masih rendah, karena belanja sebagian besar dialokasikan untuk gaji pegawai |
| 2 | Hasiana S | Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran | Kuantitatif deskriptif | Pengelolaan anggaran terlaksana sangat efisiensi |

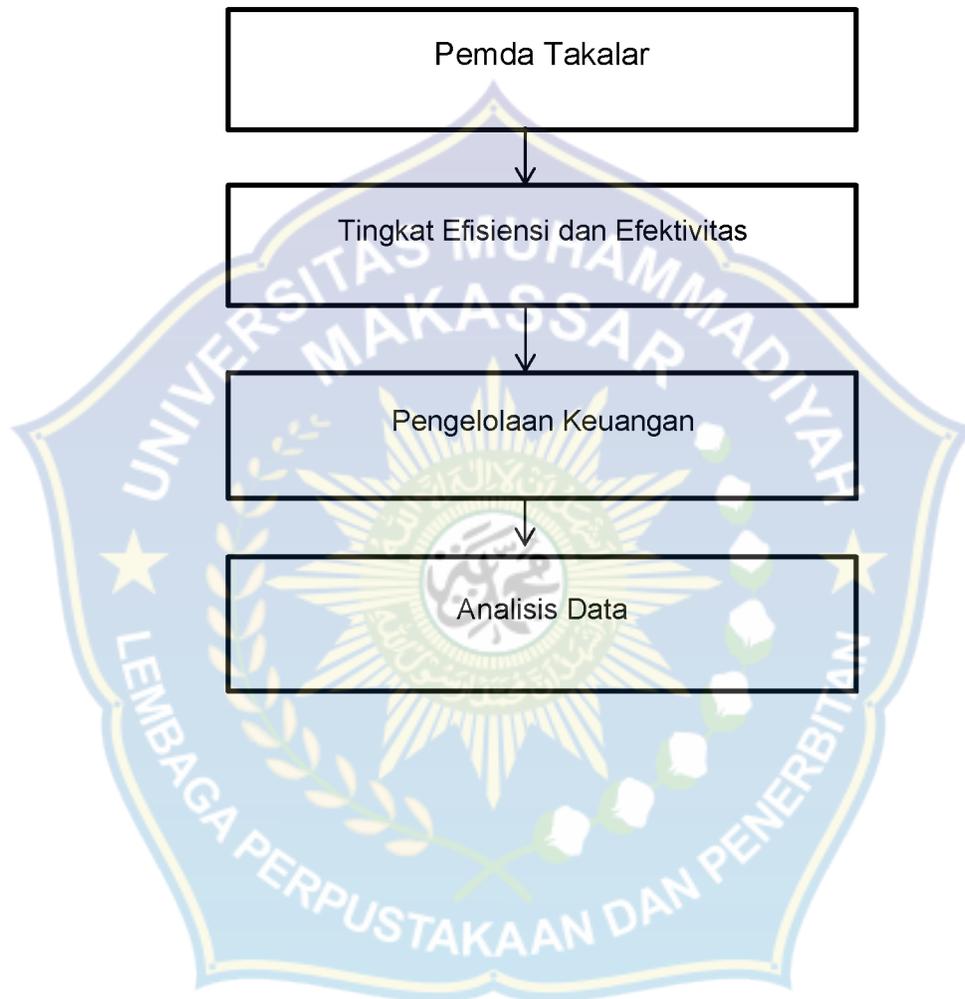
| | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|
| | | pada dinas perindustrian dan perdagangan pada kab sinjai | | karena sudah memenuhi syarat yaitu :penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimun. |
| 3 | Facrul A Siregar | Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa kabupaten deli serdang) | Analisis deskriptif | Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur rumah tangga desa |
| 4 | Novlie Manopo, Debby Ch Rotinsulu, Sri Murni | Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Minahasa Tenggara | Analisis table | Pengelolaan keuangan daerah yang maksimal guna meningkatkan perekonomian dengan menggenjot sector-sector potensial yang dimiliki |
| 5 | Tiurma Rosmauli Situmpul | Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada setiap kecamatan di kabupaten bengkayang | Bersifat deskriptif | Hasil hitungan efektivitas pendapatan terhadap belanja setiap kecamatan rata-rata diatas 90% masuk kategori efektif. |
| 6 | Nining Yunia Artanti | Analisis kinerja anggaran keuangan pendapatan dan belanja daerah (APBD) | Studi kasus | Rencana anggaran pendapatan lebih kecil dari pada realisasinya dengan varians ada pos belanja |
| 7 | Eko Santoso | Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada kabupaten ngawi | Deskriptif | Hasil analisis efisiensi dari perhitungan formulasi ini menunjukkan dibawah rata-rata ini menunjukkan bahwa |

| | | | | |
|----|--------------------------|--|-------------------------------|---|
| | | | | pemerintah daerah masih boros |
| 8 | Fikri Reza Azhari | Analisis tingkat kemandirian efektivitas, efisiensi pendapatan asli daerah pada pemerintahan kabupaten pangandaran provinsi jawa barat | | Tingkat efisiensi pendapatan hasil daerah kabupaten pangandaran dikategorikan sangat efisien setiap tahunnya |
| 9 | Siti Masitoh | Analisis efisiensi dan efektivitas, kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah | Deskriptif kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien |
| 10 | Riri Septyaningrum Putri | Analisis tingkat efektivitas,mandirian dan desentralisasi keuangan daerah menurut perspektif ekonomi islam | Analisis statistik deskriptif | Kinerja keuangan pemerintah pada tahun 2008-2017 telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam tetapi belum maksimal bila dilihat dari hasil perhitungan kinerja. |

I. Kerangka Konsep

Berdasarkan masalah yang ada, maka dibuat suatu kerangka konsep mengenai “Analisis tingkat Efisien Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar

Gambar kerangka konsep:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada yang masih terjadi sampai saat sekarang atau waktu yang lalu, jenis penelitian ini berbeda dengan eksperimen sebagai sebab tidak melakukan perubahan terhadap variable-variabel bebas mendeskripsikan suatu situasi alakadarnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu konsentrasi kepada pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan informasi yang terkait dalam masalah yang diangkat dalam proposal. Dengan demikian fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu perusahaan dalam pengelolaan keuangan daerah apakah sudah berjalan dengan efektif atau efisien.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk

memperoleh data primer, maka lokasi penelitian dilakukan di kabupaten takalar atau tepatnya di Kantor Bupati Takalar.

D. Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, data primer umumnya berupa data kualitatif untuk pembuktian data hipotetis dalam penelitian sebelumnya.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Atau lebih tepatnya data sekunder sebagai data pelengkap data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menyusun penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Wawancara, melakukan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi yang terkait dalam masalah penelitian.

- c. Dokumentasi, sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi yang didapatkan baik itu dalam bentuk, karangan/tulisan, buku, ataupun undang-undang, dan sebagainya.
- d. Studi pustaka, data dari studi pustaka diperoleh dari buku, jurnal, dokumen serta sumber tertulis lainnya yang membantu dalam penelitian termasuk data mengenai laporan keuangan pemerintah daerah pada kantor bupati takalar.

F. Instrumen Penelitian

1) Instrument Observasi

Data diperoleh melalui observasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bupati Takalar, mendapatkan bantuan alat pengamatan berupa pemberitaan di media online.

2) Instrument Wawancara

Dalam penelitian mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya untuk memperoleh informasi mengenai kinerja perusahaan pada Kantor Bupati Takalar. Adapun jenis instrument wawancara yang digunakan adalah alat tulis dan media elektronik.

3) Instrument Dokumentasi

Data yang diperoleh dari dokumentasi yaitu berupa foto/gambar keberlangsungan kegiatan rutin perusahaan.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, observasi yang dituliskan dalam catatan lapangan lokasi penelitian, dokumen resmi, atau foto-foto dan sebagainya. Dengan kata lain analisis ini dapat dimaknai sebagai proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

H. Skala Pengukuran Efektivitas dan Efisien

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan skala pengukur efektif dan efisien suatu data laporan Realisasi kita harus membandingkan persentase 100% atau dibawah 100% dalam realisasi pendapatan belanja pemerintahan daerah.

Tabel 3.1
Skala pengukuran efektivitas dan efisien

| Rasio efisien | Tingkatpencapaian | Rasio efektivitas | Tingkatpencapaian |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0 – 20 | Tidak efisien | Dibawah 40 | Sangat tidak efektif |
| 29,99 – 30 | Cukup efisien | 40 – 59,99 | Tidak efektif |
| 39,99 – 40 | Sangat efisien | 60 – 79,99 | Cukup efektif |
| | | Diatas 80 | Sangat efektif |

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Suatu Daerah atau Wilayah dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya secara alamiah tanpa terencana, namun pertumbuhan dan perkembangan secara alamiah tersebut belum tentu sesuai dengan yang di harapkan dan belum tentu sesuai dengan kaidah dan norma serta kriteria yang dijabarkan dalam teori ilmu perencanaan kota dan wilayah (*Planologi*)

Prof. Dr. Poernomosidi Hadjisarosa, MT, Dalam bukunya "Prosedur Standar Perencanaan Wilayah" berpendapat, bahwa cikal bakal suatu daerah atau wilayah baik perkotaan maupun perdesaan pertama tama atau pada awalnya muncul sebagai " Titik Simpul Jasa Distribusi " dimana pada titik simpul jasa distribusi tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan pokok yaitu jasa perdagangan dan jasa transportasi yang kemudian pada fase berikut diikuti oleh terbentuknya sarana pasar dan terminal atau pelabuhan pada daerah pesisir pantai. Ketiga sarana tersebut (pasar, terminal, pelabuhan) adalah suatau elemen yang memiliki daya tarik yang sangat kuat dan merupakan faktor penarik (Pull Factor) atau faktor pendorong (Push factor) bagi manusia / penduduk untuk datang bermukim di sekitar sarana tersebut yang lambatlaun membentuk suatu komunitas perkotaan (Urban Community) ataupun komunitas perdesaan (Rural Community)

Pada sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah atau wilayah secara garis besar di tentukan oleh 3 (tiga) aspek pokok yaitu :

1. Aspek Fisik, meliputi : posisi geografis, batasan dan tataguna lahan, prasarana dan lahan serta fasilitas dan ulitas.
2. Aspek Sosial, meliputi ; kuantitas dan kualitas kependudukan. Penduduk yang banyak dengan kualitas yang tinggi adalah potensi dan sumberdaya pembangunan, tetapi sebaliknya penduduk yang banyak dengan kualitas yang rendah adalah beban dari pembangunan itu sendiri.
3. Aspek Ekonomi, meliputi ; ekonomi makro dan ekonomi mikro, sumberdaya alam dan kegiatan usaha. Baik dari sisi historis terbentuknya suatu daerah atau wilayah yang bermula selaku " Titik Simpul Jasa Distribusi " maupun dari sisi potensi sumberdaya suatu daerah dan wilayah (Fisik, Sosial, Ekonomi) ; yang apabila diuraikan dan dibahas lebih lanjut secara sistematis berdasarkan berbagai disiplin ilmu, maka semuanya akan bermuara pada aspek modal yaitu " Keuangan ".

Begitu penting dan strategisnya aspek keuangan dalam proses kehidupan dan pembangunan, maka perlu penanganan dan kebijakan yang strategis pula. Untuk itu, dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Takalar dibentuk suatu Oraganisasi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas tata kelolah keuangan daerah, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), adalah suatu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan , sebagai unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan “Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 09 Tahun 2013 dan Pembentukan OPD baru Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar”.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), adalah suatu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan , sebagai unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan “Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 09 Tahun 2013 dan Pembentukan OPD baru Nomor : 07 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar”.

Dalam pembahasan ini menguraikan gambaran singkat organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang memuat tentang historis, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Sebelum bergabung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan sesuai dengan arah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No. 32 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, tugas dan fungsi pokok dan fungsi jabatan struktural di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar merupakan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Takalar yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati Takalar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.

2. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Takalar No. 32 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, tugas dan fungsi pokok dan fungsi jabatan struktural di Lingkungan Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Takalar merupakan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Takalar yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati Takalar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.

Dinas Pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Takalar dibidang Pembinaan Pendapatan Daerah sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Takalar. Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar N0. 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai berikut :

- a. **Kedudukan** :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- b. **Tugas Pokok** :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- c. **Fungsi** :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Takalar, kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar :

1. Kepala BPKD
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Hukum dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pendapatan.
4. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas :
1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Retribusi Daerah.
5. Bidang Anggaran terdiri atas :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah;
 2. Sub Bidang Otorisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembiayaan.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan.
7. Bidang Aset terdiri atas :
- a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Penataan Aset;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
8. UPTB

4. Job Description

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, maka uraian tugas masing-

masing jabatan dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sebagai berikut :

1. Kepala BPKD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan program, kegiatan, anggaran, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan badan.

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan, anggaran, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah.

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Kepala Sub Bidang Hukum dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pendapatan, Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Hukum dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pendapatan.

4. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

- a. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan monitoring di bidang pajak daerah.
- b. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

5. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Anggaran.

- a. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. Kepala Sub Bidang Otoritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembiayaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang Otorisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembiayaan.

6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelitian, pemeriksaan, perbaikan dan penolakan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- a. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Mempunyai tugas melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi bina akuntansi pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa, serta memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
- b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi perbendaharaan.

7. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas dalam Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan program standarisasi, perencanaan, pengadaan, penghapusan, pelelangan, inventarisasi dan pengendalian/pengawasan pengelolaan investasi baik dalam bentuk uang maupun aktiva lainnya serta kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset.

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset

Mempunyai tugas Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset.

b. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset

Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.

5. Visi dan Misi Organisasi

a. **Visi:** berasal dari kata "Vision" yang berarti impian, khayalan, pandangan masa depan yaitu suatu cita, angan, atau tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

b. **Misi:** berasal dari kata "Mission" yang berarti = suruhan, perintah; yaitu sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

"VISI" identik dengan tujuan akhir, sedangkan "MISI" identik dengan sasaran antara : maka dapat diartikan bahwa misi adalah upaya atau langkah

yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi, visi berdimensi waktu jangka panjang dan / atau menengah, sedangkan misi berdimensi waktu jangka pendek. Dengan perkataan kalimat lain, bahwa misi adalah penjabaran atau implementasi dari visi.

Dengan mengacu pada Visi Pemerintahan Kabupaten Takalar Periode Tahun 2013 - 2017 yaitu “ **Takalar Terdepan Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan, Beriman Dan Bertaqwa.** ” Cita dan angan yang ingin dicapai dalam visi dijabarkan dan di implementasikan melalui 5 (Lima) Misi pokok yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
2. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
5. Meningkatkan Penghayatan Nilai Keagamaan

Sebagai bagian integral dari Struktur Pemerintahan Kabupaten Takalar, maka Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Takalar mengedepankan suatu Visi yang juga merupakan bagian integral dan penjabaran serta implementasi dari Visi

Pemerintahan Kabupaten Takalar, terutama berkaitan dengan Tata kelola keuangan sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efisien, Efektif ,
Akuntabel dan Transparan “**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh 5 (lima) langkah misi yaitu :

1. Memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah
4. Memaksimalkan pendapatan daerah melalui dana transfer dan bantuan keuangan
5. Memaksimalkan pengelolaan asset daerah

Tujuan dan hasil (Outcome) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Takalar melalui visi-misi tersebut adalah: meningkatnya kualitas, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel, taransparan, efektif dan efisien.

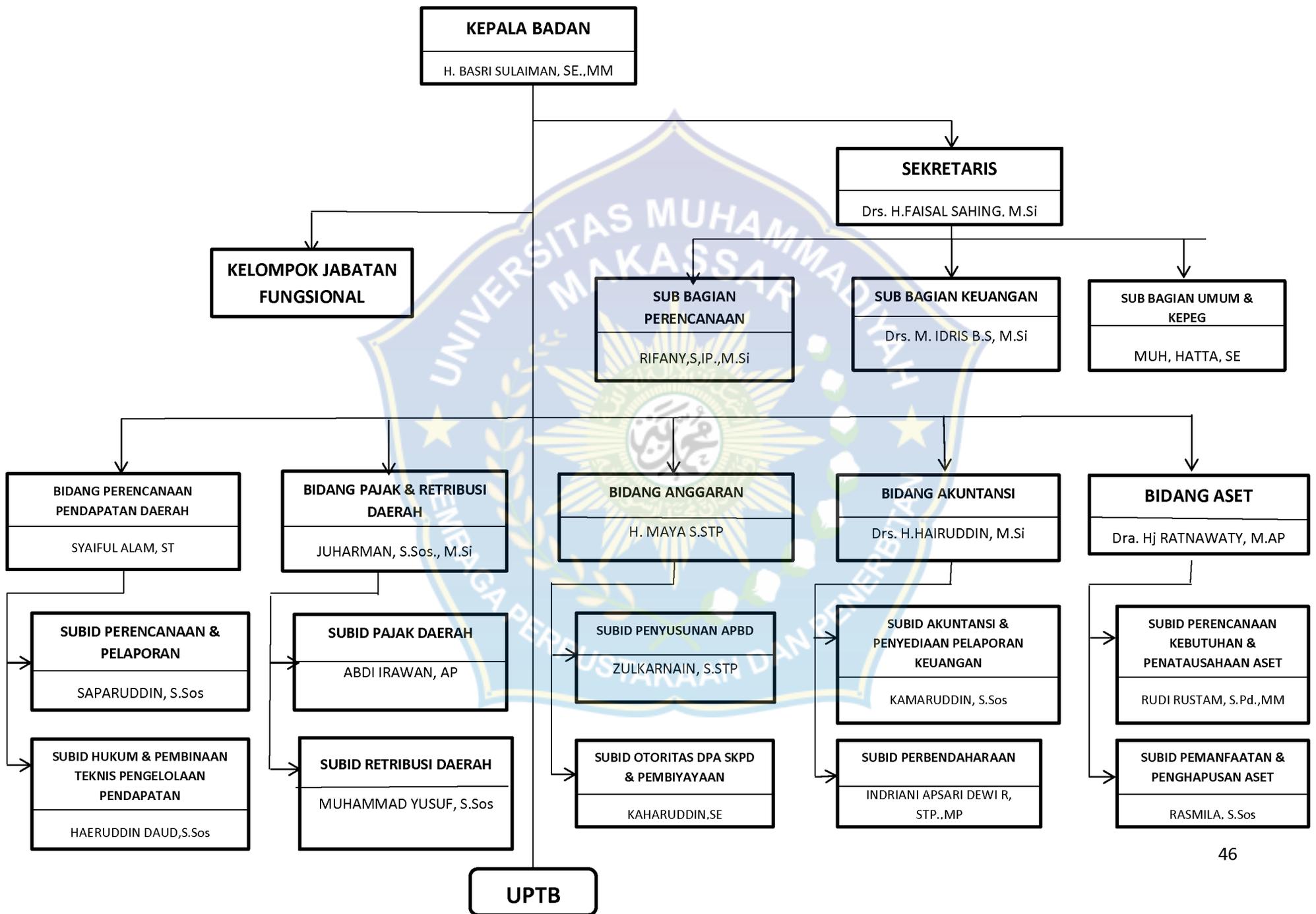
Terjadi perubahan struktur kelembagaan dari Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Takalar gabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Menjadi Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor : 63 Tahun 2016, menyebabkan terjadinya juga perubahan nilai saldo akhir aset sebagai fasilitas kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

Sesuai laporan keuangan saat masih status sebelum bergabung dengan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2016 . Sedangkan berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Inventaris Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Takalar kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 028/2685/Umum tanggal 31 Desember 2017 menunjukkan saldo aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten .

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sebagai konsekuensi logis dan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 63 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tersebut salah satu kandungannya adalah pemisahan dan/atau pembentukan lembaga baru, yaitu : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sebelumnya kedua lembaga tersebut tugas pokok dan fungsinya berada pada dua lembaga, yakni Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ini secara substantive menguraikan tentang : kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi, serta uraian Tugas setiap pejabat dan staf dalam lingkup organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.



B. Hasil Penelitian

1. Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar(SAPD)
 - a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan adanya perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan daerah nomor 04 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah.
 - b. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis Akrual pada pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah tentang sistem akuntansi pengelolaan keuangan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b , maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Takalar.
 - d. Mengingat : undang-undang nomor 29 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II di Selawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran

Negara republic Indonesia nomor 47, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4286);

- f. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4355).
- g. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (lembaran negsra republic Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4400)
- h. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republic Indonesia nomor 4438)
- i. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2011 nomor 82).
- j. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5587)
- k. Peraturan pemerintah tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 138, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4576).

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengolah sumber daya yang dimilikinya. Sistem akuntansi menjadi suatu tuntunan sekaligus kebutuhan bagi pemda.

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu percabangan akuntansi, selain akuntansi social yang mencatat perhitungan makro Negara dan akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola akuntansi bisnisnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan RI.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) ialah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi computer. SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP), yaitu :

a. Basis Kas

Sistem akuntansi pemerintah daerah menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening kas daerah.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi ialah setiap transaksi dibukakan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara (Nurdiawan : 2008) Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Modal Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional

2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Penyajian Laporan Keuangan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Takalar berdasarkan Hasil pengambilan File pada klinik akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. Laporan perubahan saldo, neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Anggaran merupakan bagian terpenting dari akuntansi manajemen sektor publik. Anggaran pada hakekatnya merupakan salah satu alat instrument yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat empat tujuan proses penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2002:68) ialah:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Secara umum pendapatan dalam APBD dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana alokasi umum. Pendapatan APBD dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

husus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda.

Dibawah ini laporan realisasi dan anggaran pendapatan daerah takalar sebagai berikut :

Tabel 4.1

LAPORAN REALISASI DAN ANGGARAN PENDAPATAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TAKALAR
(untuk tahun berakhir 2017-2018)

| No | Uraian | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|----|--------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 01 | PENDAPATAN | | | | |
| 02 | PENDAPATAN ASLI | | | | |
| 03 | PAD Pajak daerah | 40.199.296.750 | 26.501.805.511 | 90,80 | 24.465.255.880 |
| 04 | PAD Retribusi daerah | 4.755.645.700 | 2.005.431.291 | 42,17 | 2.802.036.691 |
| 05 | PAD hasil pengelolaan kekayaan | 10.208.843.800 | 8.674.271.961 | 84,97 | 10.170.250.932 |
| 06 | Lain-lain PAD yang sah | 107.996.328.480 | 78.005.151.315 | 72,23 | 74.265.250.610 |
| 07 | Jumlah pendapatan | 163.160.114.730 | 125.186.750.078 | 76,73 | 111.702.803.114 |

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun Anggaran nilai persentasi laporan realisasi pada Pendapatan Pajak Daerah yaitu 90,80% itu menunjukkan bahwa nilai persen dari PAD Pajak Daerah sangat efektif, sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah tidak efektif yaitu 42,17%. Kemudian pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan menunjukkan bahwa nilai 84,97% sangat efektif. Dan pada Lain-lain Pendapatan yang sah menunjukkan cukup efektif yaitu 72,23%. Dan pada total jumlah Pendapatan menunjukkan bahwa nilainya cukup efektif yaitu 76,73%

Tabel diatas menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan pada Badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Takalar, Laporan Realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan kepentingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan. Tabel diatas menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan pada tahun 2018 yang cukup efektif

3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2017-2018 merupakan gambaran langkah kongkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanannya. Pemerintah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ketahun, sebagai acuan secara nasional laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah Realisasi belanja pemerintah Kabupaten/Kota selama tahun ketahun semakin naik. Tentunya peningkatan belanja tersebut pemerintah daerah ini ditunjang oleh peningkatan pendapatan dimana dari tahun 2017 akan naik dan akan semakin menginkat pada tahun 2018. Untuk mengimbangnya, pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dibawah ini Laporan Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2017-2018:

Tabel 4.2

LAPORAN REALISASI DAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
(tahun berakhir 2017-2018)

| No | Uraian | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|----|------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 01 | BELANJA MODAL | | | | |
| 02 | B. tanah | 5.231.020.000 | 4.642.747.000 | 88,75 | 372.514.202 |
| 03 | B. peralatan | 25.829.272.940 | 24.936.275.430 | 96,54 | 19.497.495.098 |
| 04 | B. gedung | 39.418.700.260 | 37.597.151.989 | 95,38 | 33.332.547.044 |
| 05 | B.jalan,jaringan | 112.862.603.020 | 109.535.814.069 | 97,05 | 165.117.992.534 |
| 06 | B.asettetplainya | 847.633.600 | 847.622.600 | 100,00 | 2.128.397.488 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 07 | B aset lain | 403.900.000 | 253.600.000 | 62,79 | 354.990.000 |
| 08 | JumlahB. modal | 184.592.603.020 | 177.813.211.088 | 96,33 | 220.803.936.366 |
| 09 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 10 | B. tak terduga | 4.512.299.155 | 250.000.000 | 5,54 | 0,00 |
| 11 | Jumlah B.tak terduga | 4.512.299.155 | 250.000.000 | 5,54 | 0,00 |
| 12 | JUMLAH BELANJA | 1.078.111.692.271 | 976.041.599.307 | 90,53 | 981.132.519.941 |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Laporan Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar menunjukkan nilai presentasi, pada Belanja Tanah persennya yaitu 88,75% itu menunjukkan bahwa belanja daerah sangat efektif. Kemudian pada Belanja Peralatan persennya yaitu 96,54% bahwa sangat efektif. Sedangkan pada Belanja Gedung juga sangat efektif yaitu sebesar 95,38. Dan pada Belanja jalan, dan jaringan yang sangat efektif sebesar 97,05%. Dan pada Belanja aset tetap lainnya menunjukkan yang sangat-sangat efektif yaitu sebesar 100,00%. Dan pada Belanja aset lain, Belanja tak terduga menjukkan bahwa Belanja tersebut tidak efektif. Dan pada total Laporan Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah menunjukkan nilai yang sangat efektif ialah sebesar 90,53%.

C. Pembahasan

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi adalah sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan (output) diminimalkan dengan masukan yang digunakan (input) dimaksimalkan. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit.

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk meningkatkan Pendapatan daerahnya. Dalam upayanya pemenuhan pembiayaan pelayanan publik. Pertama, Pemerintah Kabupaten Takalar memperoleh dan dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, tampak bahwa pada APBD 2018 ditargetkan meningkat dari realisasi pendapatan seluruh Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2017. Namun target tersebut mengalami kenaikan banyak bergantung pada transfer pemerintah pusat yaitu dana perimbangan, sedangkan kenaikan PAD dan pendapatan lain-lain diperkirakan masih menempati porsi yang kecil.

Anggaran tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada

tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini terletak pada prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Takalar merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Kabupaten Takalar, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah kabupaten Takalar secara tersanding. Penyajian antara anggaran dengan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati legislative dengan eksekutif.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembayaran. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar tahun Anggaran 2017-2018, secara umum dapat dikatakan cukup efektif. Dimana tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi Anggaran pemerintah dengan target anggaran penerimaan, sehingga nilai efektivitas PAD 90%-99% dikategorikan cukup efektif. Pada masa penerapan anggaran berbasis kinerja telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada tiap tahun masih dibawah 100% dengan kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.

Secara umum dilihat dari kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Takalar dapat dikatakan sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Takalar berhasil memanfaatkan anggaran belanjannya menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah ialah berjalan lancar didukung dengan

infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2017-2018 pemerintahan Kabupaten Takalar bisa dikatakan sangat efektif dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya peningkatan dilakukannya perbaikan kinerja oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Takalar efektif dilakukan dan mengalami peningkatan yang signifikan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2017-2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan baik, maka semakin besar pula tingkat efektivitas kinerja instansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah kabupaten Takalar yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta pembangun jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas *performance based budgeting*. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkrit dan nilai baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif.

Dari hasil wawancara tingkat kesesuaian dana yang diberikan dengan realisasi kegiatan pemerintah Kabupaten Takalar berada pada angka rata-rata

90%. Jumlah hasil dari proses atau kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, jika ada ketidaksesuaian kemungkinan ada beberapa hal yang sifatnya nasional misalnya kebijakan dari pusat atau ada hal-hal lain dan kendala yang salah teknis terjadi ketidaksesuaian pada saat pelaksanaan. Namun peluangnya sangat kecil dibandingkan seluruh jumlah program kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Takalar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hasiana S, dengan hasil penelitian yang Pengelolaan anggaran terlaksana sangat efisien karena sudah memenuhi syarat yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum. Kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiurma Rosmauli Situmpul dengan hasil penelitian perhitungan efektivitas pendapatan terhadap belanja setiap kecamatan rata-rata diatas 90% masuk kategori efektif. Dan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Facrul A Siregar yang hasil penelitiannya mendorong pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur rumah tangga desa.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian terdahulu dengan peneliti Eko Santoso dengan hasil penelitian analisis efisiensi dari perhitungan formulasi ini menunjukkan dibawah rata-rata yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros. Sedangkan pada pemerintah Kabupaten Takalar bisa nilai sudah cukup efektif dalam mengelola Pendapatan dan belanja daerah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang didapat dari pengukuran tingkat efisien pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan menggunakan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Takalar dari tahun 2017-2018 kurang efisien disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kurang baik pada Pendapatan Retribusi Daerah. Pada masa penerapan anggaran berbasis kinerja telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada tiap tahun masih dibawah 100% dengan kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.

Hasil yang didapat dari pengukuran tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Takalar dengan menggunakan Realisasi Anggaran maka tingkat efektivitas dari tahun ke tahun cukup efektif ini diakibatkan karena pencapaian anggaran yang telah ditetapkan dari tahun ketahun kurang dari 100%. Dimana tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi Anggaran pemerintah dengan target anggaran penerimaan, sehingga nilai efektivitas PAD 90%-99% dikategorikan cukup efektif.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Otonomi daerah dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia, baiknya Pimpinan Pengelola Keuangan, Dinas PPKAD Kabupaten Takalar agar dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah sehingga bisa menyesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan pengelolaan keuangan daerah Pada Dinas PPKAD Kabupaten Takalar Pengelola Keuangan, ditingkatkan dan efektif
2. Diupayakan untuk dilakukan perbaikan tingkat efisien pengeluaran/belanja rutin agar tetap efisien.
3. Disarankan kepada pembaca lain atau peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, 2007. *Statemen Of Financial Accounting Concept (SFAC)*. Jakarta
- Bratakusumah, 2010. Deddy Supriady dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Darise, Nurlan, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Indonesia
- Eka Putri Suciati, 2014. Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Perusahaan pada PT. Amana Finance. Skripsi Sarjana Akuntansi. Stie Nobel Indonesia. Makassar
- Fidelius, 2013. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No.4 ISSN 2303-1174, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3418> Diakses 16 Oktober 2015. Hal.2088-2096. Manado
- Faud Muhammad Ramli, 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Grossman, Gregory. 2001. Sistem – Sistem Ekonomi, Edisi Bahasa Indonesia PT. BUMI AKSARA. Jakarta.
- Harahap Syafitri Sofjan, 2009. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hariadi, Pramono, Yanuar Restiano, Ickuk Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empa, Jakarta.
- Hasdiana, 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pada Kabupaten Sinjai. Universitas Muslim Maros.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. Standar Akuntansi Keuangan: Salemba Empat. Jakarta
- Jae Shim dkk, 2000. Analisis Laporan Keuangan: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2010. *Public Sector Accounting Sixth edition*, : Financila Times- Prentice Hall, London.

- Kasmir, 2012. Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Kelima): PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kasmir, 2013. Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Keenam): PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kementrian Dalam Negeri, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Lapananda, Yusran, 2015. Asas - Asas Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (bagian I). Gorontalo.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi yogyakarta.
- Mahsun Moh, dkk. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.
- Risman, 2015. Sistem Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Solihin,dadang, 2006. Keuangan Publik Pusat dan Daerah. PT. Artifa Duta Prakarsa. Jakarta.
- Sudarsono, dan edilius, 1994. Kamus Ekonomi Uang & Bank (cetakan pertama), Rineka Cipta. Jakarta
- Salamadian, 2018, Pengertian, Perbedaan & Contohnya Lengkap. Jakarta.
- Sitompil, Rosmauli, Tiurma. 2018. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bengkayang. Bengkayang
- Siregar, A Fchrul, dan BZ, Syam, Fazli. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (studi pada desa kabupaten deli serdang). Deli Serdang
- Saraswati, Erwin. 2018. Efisiensi Dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah. Jawa Timur
- Santoso, Eko. 2011. Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Ngawi. Surakarta
- Utami, Purwaning, Susiati. 2014. Analisis Motivasi, Kepuasan, Kualitas Serta Efektivitas Kerja Didalam Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT.Pelayanan Nasional Indonesia. STIA YAPPANN

